

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 15, menjelaskan pemegang hak atas tanah wajib untuk mengelola, menggunakan, memanfaatkan atau mengusakan tanahnya. Hal tersebut maka menimbulkan suatu konsekuensi apabila tanah tersebut sesuai sifat hak nya tidak dipergunakan maka dapat dikatakan tanah tersebut tentu tidak menimbulkan manfaat apapun bagi masyarakat dan negara. Maka sesuai dengan Pasal 27 UUPA dikatakan sebagai tanah terlantar. Tanah terindikasi terlantar di wilayah kota Semarang tercatat tujuh di *database* dan sebagian besar berupa tanah HGB.

Tujuan dari penelitian penulisan hukum untuk mengetahui dan menganalisis Proses inventarisasi tanah terindikasi terlantar oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya yang ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar.

Metode penelitian pada penulisan hukum ini yaitu metode penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan melakukan wawancara pada Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu berdasarkan data yang dikumpulkan, lalu dikelompokkan, dan disortir hingga akhirnya dapat untuk disatukan dan dikelola sehingga menemukan pola dan bisa disebarluaskan kepada orang lain.

Hasil Penelitian dan Pembahasan adalah : (1) Terdapat 7 (tujuh) tanah terindikasi terlantar di *database* tanah terindikasi terlantar Kota Semarang dan keseluruhannya sudah dilakukan proses inventarisasi oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang secara optimal karena sesuai dengan Peraturan yang berlaku. (2) Tidak semua pemegang hak atas tanah melakukan upaya terhadap tanahnya yang terindikasi terlantar. 3 (tiga) diantaranya sudah melakukan upaya dan sudah dikeluarkan dari *database*. Sedangkan 4 (empat) diantaranya masih belum melakukan upaya apapun sehingga masih tercatat dalam *database* tanah terindikasi terlantar. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini tidak melakukan tindakan apapun dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Tanah Terindikasi Terlantar, Penertiban Tanah Terlantar, Upaya Pemegang Hak.

ABSTRACT

Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA) Article 15, explains that land rights holders are obliged to manage, use, utilize or destroy their land. This then creates a consequence if the land according to the nature of its rights is not used then it can be said that the land certainly does not generate any benefits for the community and the state. So in accordance with Article 27 of the UUPA it is said to be abandoned land. There are seven indications of abandoned land in the city of Semarang in the database and most of them are HGB land.

The purpose of research on legal writing is to find out and analyze the process of inventorying land indicated as abandoned by the Semarang City Land Office and to find out and analyze the efforts made by land rights holders for their land which is designated as land indicated as abandoned.

The research method employed the empirical juridical legal research method. The researcher gathered data through primary and secondary data by conducting interviews with authorized officials at the Semarang Land Office and the Central Java Provincial Office. This study utilized qualitative data analysis. Qualitative data analysis is a procedure that is done by significantly depending on the data obtained, grouping the data, and sorting the data, which is then put together and can be managed, searched, and patterns can be identified, what is important and what can be learned, and subsequently can be shared with others.

The findings and discussion were: (1) There are 7 (seven) indicated abandoned lands in the Semarang City abandoned land database and all of them have been optimally inventoried by the Semarang City Land Office. (2) Not all land rights holders have made efforts for their indicated abandoned land. 3 (three) of them have made efforts and have been removed from the database. While 4 (four) of them still have not made any efforts so that they are still recorded in the database of indicated abandoned land. The Regional Office of Central Java Province in this case did not take any action in overcoming these problems. So it can be said that the Regional Office of Central Java Province does not implement the applicable regulations.

Keywords: *Indicated Abandoned Land, abandoned land management, Rights Efforts of Rightsholders*